
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN TANGERANG

Winarno, Adhi Kusnadi, Nunik Afriliana

Program Studi Informatika, Universitas Multimedia Nusantara
e-mail: pmwinarno@umn.ac.id

ABSTRAK

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Data SIPD terdiri dari delapan kelompok data, yaitu (Data Umum, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Ekonomi, Keuangan daerah, Politik/hukum/Keamanan dan Insidental, serta 31 jenis data dan 2691 Elemen data. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah bekerjasama dengan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) untuk mengembangkan SIPD Kabupaten Tangerang. Untuk selanjutnya SIPD berbasis web tersebut telah diimplmentasikan dan berhasil dioperasionalkan oleh Tim UMN. Langkah-langkah implementasi SIPD meliputi penetapan Domain Name (nama domain internet untuk diakses oleh pengguna), hosting sistem, dan pelatihan operator. Adapun Domain Name telah diputuskan menggunakan nama URL sipd.tangerangkab.go.id. Sedangkan hosting sistem telah dilakukan pada server di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Pelatihan operator telah dilakukan pada Tanggal 7-8 Februari 2019 dalam dua kelompok, yaitu kelompok operator dari dinas-dinas di Kabupaten Tangerang, dan kelompok operator dari kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tangerang. Dengan adanya pelatihan tersebut, maka para operator Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Dinas-Dinas dan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Tangerang telah dapat mengoperasikan sistem dan menginputkan data masing-masing ke dalam sistem, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dengan demikian, maka data pembangunan di Kabupaten Tangerang dapat disediakan dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Kata Kunci: Sistem, Informasi, Pembangunan, Daerah, Kabupaten Tangerang, kelompok data.

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu input perencanaan, proses perencanaan dan output perencanaan. Untuk dapat mewujudkan perencanaan yang baik dan komprehensif sebagai titik pening tahapan input perencanaan, maka dibutuhkan basis data dan informasi yang valid, update, dan

akuntabel serta analisis pembangunan daerah yang dapat menggambarkan kondisi daerah secara utuh (BAPPENAS, 2013).

Selanjutnya dalam proses perencanaan, ketersediaan data dan informasi serta analisis pembangunan daerah yang berkualitas, sangat menentukan tingkat kualitas dari perumusan kebijakan dan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, sehingga

diharapkan, output perencanaan pembangunan daerah berupa dokumen rencana pembangunan mampu untuk menjawab permasalahan pembangunan dan pencapaian target pembangunan.

Pasca diundangkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terdapat perubahan-perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya terkait dengan pembangunan daerah dimana pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional (Chengsen Sipahutar et al. 2018). Di sisi lain, terdapat juga perubahan dalam hal nomenklatur kelembagaan di daerah sebagaimana yang sudah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (PP, 2016). Kedua hal ini, pada prinsipnya berdampak pada proses perencanaan pembangunan di daerah, dimana dalam perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan data yang diklasifikasikan berbasis urusan pemerintahan.

Pasal 274 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Implikasi dari adanya amanat dalam pasal 274 ini, maka seluruh data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah seharusnya diinput dalam sistem informasi Pemerintah daerah (SIPD). Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian.

Dalam konsep SIPD lama, pada prinsipnya proses pengumpulan data belum berfokus untuk data perencanaan pembangunan daerah dimana SIPD cenderung hanya sebagai bank data pembangunan. Di sisi lain, konsep keterisian data adalah hal yang utama, belum kepada tujuan penggunaan data sehingga berdampak pada rendahnya komitmen

pemda dalam pengelolaan SIPD (Gultom, 2016). Selanjutnya, kelompok data, jenis data, dan elemen data dalam SIPD lama masih tercampur antara data dan informasi.

Selanjutnya, pasal 258 dan pasal 259 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengamanatkan bahwa agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mencapai target pembangunan nasional. Dalam upaya sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah SIPD diharapkan memiliki peran penting khususnya terkait dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, update, dan akuntabel. Di sisi lain, SIPD diharapkan mampu mendukung terciptanya sinkronisasi data pusat dan daerah untuk dapat mewujudkan **single database** nasional, sehingga optimalisasi penggunaan SIPD memiliki keterkaitan yang erat dalam mendukung tercapainya efektivitas dan efisiensi sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah. (Chengsen Sipahutar et al. 2018).

Untuk mendukung pengembangan statistik melalui sistem statistik nasional (SSN), ditjen bina pembangunan daerah bersama dengan badan pusat statistik (BPS) juga telah berkomitmen untuk saling bekerja sama khususnya dalam hal pengumpulan data statistik sektoral dan data statistik dasar. Oleh karena itu, dalam hal ini SIPD menjadi salah satu bagian untuk memenuhi kebutuhan data statistik dalam sistem statistik nasional (SSN).

1. SIPD SEBAGAI PENYEDIA DATA DAN INFORMASI

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Data/informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah serta bahan penentu/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, karena pada saat ini data-data pembangunan dipandang belum lengkap sehingga diperlukan suatu upaya untuk melengkapi dan senantiasa untuk memperbaruinya dengan pengumpulan data secara bertahap dengan mekanisme merubah dari pola secara manual ke pola elektronik.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Data SIPD terdiri dari 8 kelompok data (Data Umum, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Ekonomi, Keuangan daerah, Politik/hukum/Keamanan dan Insidental), 31 jenis data dan 2691 Elemen data. (Net, 2015)

2. PERMASALAHAN

1. Belum optimalnya integrasi data perencanaan pembangunan yang bersumber dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) prov, kab/kota dan instansi vertikal
2. Ketidak-seragaman tolok ukur (indikator) format data, tahapan pengelolaan data serta sistem penyajian, sehingga menyulitkan integrasi data

Oleh sebab itu kebutuhan data akurat sangat mendesak. Maka telah dibentuk suatu lembaga yang menangani pengelolaan integrasi data untuk mewujudkan Satu Data Pembangunan di Kabupaten Tangerang. Diharapkan Sub-Bid Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan dapat mewujudkan Satu Data untuk Pembangunan Kabupaten Tangerang, karena data yang valid, seragam dapat memudahkan proses perencanaan pembangunan

Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 31 yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan permasalahan dan tuntutan akan perubahan dalam SIPD, maka saat ini telah terdapat perubahan-perubahan dalam SIPD, yaitu (1) SIPD saat ini fokus kepada untuk perencanaan pembangunan daerah, (2) data dalam SIPD saat ini dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (3) SIPD menjadi persyaratan dalam pengajuan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan (4) pengembangan SIPD menjadi 4 bagian yaitu e-database, e-planning, e-budgeting, dan e-monev.

METODE

Sebelum dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka terlebih dahulu telah dilakukan kegiatan pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. Dari situ kemudian dilakukan kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.

Langkah-langkah implementasi SIPD meliputi penetapan Domain Name (nama domain internet untuk diakses oleh pengguna), hosting sistem, dan pelatihan operator. Adapun Domain Name telah diputuskan menggunakan nama URL sipd.tangerangkab.go.id. Sedangkan hosting sistem telah dilakukan pada server di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Pelatihan operator telah dilakukan pada Tanggal 7-8 Februari 2019 dalam dua kelompok, yaitu kelompok operator dari dinas-dinas di Kabupaten Tangerang, dan kelompok operator dari kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tangerang. Dengan adanya pelatihan tersebut, maka para operator Sistem Informasi

Pembangunan Daerah di Dinas-Dinas dan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Tangerang telah dapat mengoperasikan sistem dan menginputkan data masing-masing ke dalam sistem, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dengan demikian, maka data pembangunan di Kabupaten Tangerang dapat disediakan dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan ini adalah Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang telah di-hosting di Server Dinas Kominfo Kabupaten Tangerang, dengan nama doman: <http://sipd.tangerangkab.go.id>
2. Telah dilakukan uji coba sistem, dan sistem dapat berjalan dengan baik.
3. Telah diberikan otorisasi kepada para pengguna, baik pengguna (operator) dari Dinas-dinas, maupun operator sistem dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang.
4. Telah dilakukan pelatihan pengguna dari Dinas-dinas dan kecamatan-kecamatan pada tanggal 7-8 Februari 2019, sehingga para pengguna akan dapat mengoperasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah tersebut.

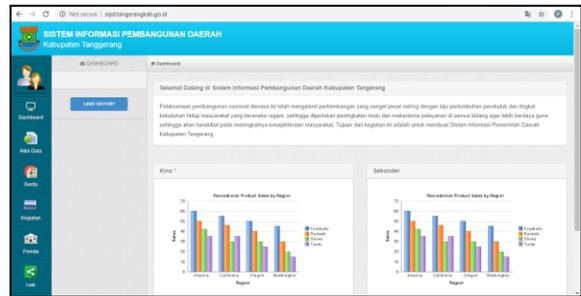
Dengan telah dilakukan pelatihan penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, maka para pengguna selanjutnya dapat melakukan input data pembangunan dari dinas dan kecamatan masing-masing, sehingga akhirnya Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat menampilkan data Pembangunan yang up-to-date.

Sebelum ada SIPD ini, Pemerintah Kabupaten sering mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi hasil pembangunan di Kabupaten Tangerang. Dengan adanya SIPD ini, maka

informasi pembangunan dapat di-update dari waktu ke waktu, sehingga selalu up-to-date.

Adapun tampilan dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Tampilan Halaman Muka SIPD Kabupaten Tangerang



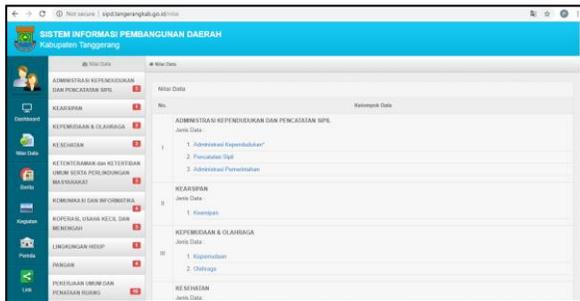
Gambar 1. Tampilan Halaman Muka Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.

Apabila kita menetik <http://sipd.tangerangkab.go.id> maka akan muncul tampilan seperti tampak pada Gambar 1. Pada Tampilan Halaman Muka dari SIPD Kabupaten Tangerang ini tampak identitas dari aplikasi berupa tulisan "Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang" disertai Logo Kabupaten Tangerang. Selain itu tersedia menu-menu, yaitu:

- Menu User,
- Menu Dashboard,
- Menu Nilai Data,
- Menu Berita,
- Menu Kegiatan,
- Menu Pemda,
- Menu Link
- Menu Contact Us

Sebagai ketetapan (default), pada Halaman Utama ini ditampilkan Menu Dashboard, yang menampilkan data berupa grafik sektor tertentu.

2. Tampilan Menu Nilai Data

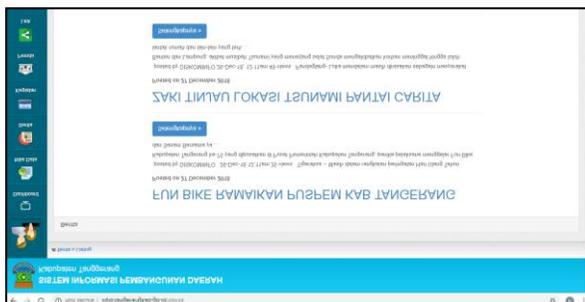


Gambar 2. Tampilan Nilai Data dari SIPD Kabupaten Tangerang

Apabila kita meng-klik Menu Nilai Data, maka akan muncul tampilan Menu Nilai Data seperti tampak pada Gambar 2. Pada Tampilan ini tampak adanya data-data yang sudah terisi dari berbagai sektor atau dinas dan kecamatan. Apabila kita ingin mengetahui data tersebut, maka kita dapat meng-klik pada kotak data tersebut, sehingga selanjutnya informasi yang ada akan ditampilkan.

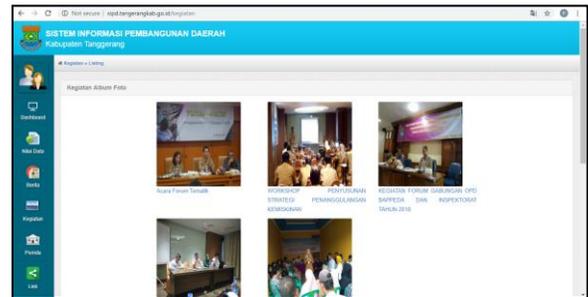
3. Tampilan Menu Berita

Apabila kita meng-klik menu Berita, maka akan muncul tampilan seperti pada Gambar 3. Pada tampilan Menu Berita tampak beberapa judul berita dan Lead Berita. Untuk mengetahui isi berita lebih lanjut, maka kita dapat meng-klik pada judul berita tersebut.



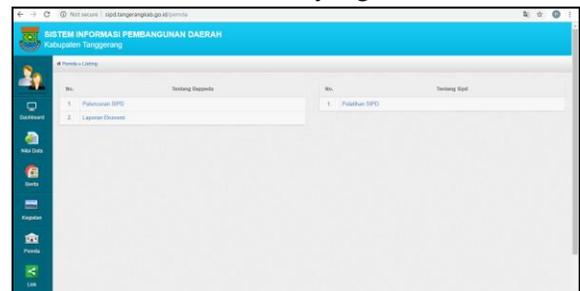
Gambar 3. Tampilan Menu Berita pada SIPD Kabupaten Tangerang.

4. Tampilan Menu Kegiatan



Gambar 4. Tampilan Menu Kegiatan pada SIPD Kabupaten Tangerang.

Apabila kita meng-klik Menu Kegiatan, maka akan muncul tampilan seperti pada Gambar 4. Dalam tampilan tersebut tampak beberapa foto yang merupakan foto kegiatan yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Untuk mengetahui keterangan lebih jauh tentang kegiatan tersebut, maka pengunjung dapat meng-klik foto tersebut. Informasi kegiatan tersebut dapat berupa tayangan video juga. Apabila video itu di-klik, maka video tersebut akan ditayangkan.



Gambar 5. Tampilan Menu Pemda dari SIPD Kabupaten Tangerang.

Apabila kita meng-klik Menu Pemda, maka akan muncul tampilan seperti tampak pada Gambar 5. Pada Menu Pemda ini ditampilkan informasi mengenai Laporan yang tersedia dan dapat diunduh oleh pengunjung SIPD, misalnya Laporan Ekonomi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Tangerang telah berhasil diimplementasikan dengan nama domain sipd.tangerangkab.go.id; dan sistem tersebut telah dihosting di server Dinas Kominfo Kabupaten Tangerang. Selanjutnya dengan diadakannya pelatihan kepada para user (operator) sistem tersebut, maka para user dari kalangan dinas-dinas dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tangerang telah dapat menggunakan sistem tersebut, sehingga siap menggunakan sistem tersebut. Implikasi dari kegiatan ini adalah bahwa data pembangunan di Kabupaten Tangerang dapat diinput oleh para user, sehingga Kabupaten Tangerang dapat menyediakan data pembangunan yang up-to-date. Hal ini sangat membantu pengambilan keputusan di tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Tangerang, yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Penulis, berupa implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. Terima kasih juga kepada mahasiswa UMN Rizki Aulia Rahman yang telah membantu mengembangkan software ini; Jani Suhandi yang telah membantu melakukan hosting sistem; dan Dinas Kominfo yang telah menyediakan Nama Domain dan Server untuk SIPD Kabupaten Tangerang, serta para dosen dan mahasiswa yang membantu dalam Pelatihan user SIPD Kabupaten Tangerang.

DAFTAR REFERENSI

Bappeda, (2018). Buku Panduan Pengoperasian Aplikasi Satu Data Pada SIPD Kabupaten Tangerang, Tangerang: Bappeda Kab. Tangerang.

BAPPENAS. 2013. *MEMBANGUN SISTEM DATABASE MDGs DAN PROGRAM PEMBANGUNAN*.https://www.bappenas.go.id/files/1013/8070/7100/Buku_III_Sistem_Database_MDGs_dan_Program_Pembangunan.pdf (September 2, 2019).

Gultom, Depitasari. 2016. “Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Dalam Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Pada Bappeda Provinsi Jawa Timur).” *Jurnal mahasiswa.unesa.ac.id*.

Net, Pemerintah. 2015. “Sistem Informasi Pembangunan Daerah - Pemerintah.Net.” <http://pemerintah.net/sistem-informasi-pembangunan-daerah/> (September 3, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

PP, RI. 2016. *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 2016*. <http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PP-NOMOR-18-TAHUN-2016-PERANGKAT-DAERAH.pdf> (September 2, 2019).

Sipahutar, Chengsen et al. 2018. “PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH (Studi Atas Dinas Kelautan

Dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
).” *Jurnal.USU.ac.id*.

Sipahutar, Chensen. 2018. *ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH (Studi Atas Dinas Kelautan*

Dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara).

[http://repositori.usu.ac.id/handle/](http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7168)

123456789/7168 (September 2, 2019).

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.